



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. bahwa ketentuan Pasal 12 huruf k Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, kelompok kerja pengarusutamaan gender diamanatkan untuk menyusun rencana aksi Pengarusutamaan Gender di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah strategi yang akan memberikan arah kepada setiap *stakeholder* yang berupa tahapan program dan kegiatan dalam melaksanakan PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di daerah yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan

politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

8. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang responsif gender.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - b. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi di Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD PUG Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG DI DAERAH;
 - c. BAB III : PEMANTAUAN EVALUASI PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PUG;
 - d. BAB IV : RAD PUG; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) RAD PUG Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) PD melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan responsif Gender di setiap PD masing-masing.
- (2) Pokja PUG melakukan pemantauan RAD PUG Tahun 2024-2026 di Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pelaksanaan pemantauan RAD PUG Tahun 2024-2026 dapat dilakukan melalui rapat koordinasi Pokja PUG.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan RAD PUG Tahun 2024-2026 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pokja PUG melakukan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2024-2026, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, setiap akhir tahun.

- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, maupun unsur non pemerintah lain.
- (3) Pelaksanaan evaluasi RAD PUG Tahun 2024-2026 dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau rapat kerja Pokja PUG.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2024-2026 menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan RAD PUG dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan RAD PUG Tahun 2024-2026 di Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan pengawasan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pembangunan daerah.
- (3) Hasil pengawasan pelaksanaan RAD PUG Tahun 2024-2026 disampaikan kepada Ketua Pokja PUG untuk ditindaklanjuti.

Pasal 7

- (1) Pokja PUG menyusun laporan pelaksanaan RAD PUG Tahun 2024-2026 di Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaporan pelaksanaan PUG dilakukan oleh Ketua Pokja PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

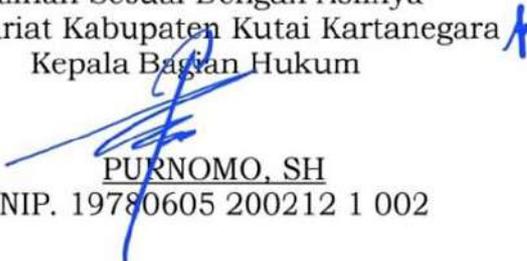
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2024-2026

RAD PUG TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa "Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional". Dengan demikian, PUG merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan, baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Strategi PUG memberikan jaminan agar pembangunan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki dari berbagai identitas sosial, baik pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah maupun lembaga lain. Tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di tingkat nasional, gender ditetapkan sebagai arus utama dalam agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Artinya, perspektif gender ditetapkan dalam setiap proses pembangunan, dan memastikan *output*, *outcome* dan dampak

pembangunan dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan mencapai keadilan dan kesetaraan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan disusunnya rencana aksi daerah pengarusutamaan gender (RAD PUG) yang akan memberikan arah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dalam setiap tahapan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di daerah yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan. RAD PUG yang disusun selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
14. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 68);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 Nomor 147);

C. Prinsip

- a. Non diskriminasi;
- b. Keadilan;
- c. Kesetaraan;
- d. Partisipatif;
- e. Akuntabel;
- f. Transparansi;
- g. Akuntabilitas;
- h. Keterbukaan informasi;
- i. Supremasi hukum;
- j. Berkelanjutan;
- k. *Be Bena*;
- l. *Be Bakti*; dan
- m. *Be Mulia*.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD PUG antara lain:

- 1. Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan PUG;
- 2. PUG dalam siklus pembangunan; dan
- 3. Perencanaan program/kegiatan dan target tahunan.

BAB II KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG DI DAERAH

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki visi “mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia” yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagaimana dalam gambar berikut:



Visi dan misi tersebut yang kemudian menjadi pijakan dalam merancang strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan dirancang untuk menjawab isu strategis daerah dengan fokus tahunan terlihat pada gambar berikut:



Isu strategis daerah, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut menjadi pijakan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan dalam RAD PUG. Rancangan program dan kegiatan dalam RAD PUG mengacu pada RPJMD, Renstra dan Renja PD yang berkontribusi pada indikator gender.

A. Isu Strategis Gender Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam menyusun RAD PUG, penting untuk melihat data dan fakta kesenjangan gender sebagai data dasar dalam merancang strategi, program/kegiatan dan target capaian dan besaran anggaran untuk masing-masing program atau kegiatan. Data capaian indikator gender Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 terlihat dari data indikator gender berikut yang meliputi Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG):

Indikator gender/komponen pendukung	Perempuan	Laki-laki	Nilai
IPG (Indeks Pembangunan Gender)			79,8%
- Angka harapan hidup	74,51	70,69	
- Rata-rata lama sekolah	8,81	9,59	
- Harapan lama sekolah	13,67	13,57	
- Pengeluaran perkapita	4.900.000	19.097.000	
IDG (Indeks pemberdayaan Gender)			63,4%
- Perempuan dalam parlemen	15,56		
- Perempuan sebagai tenaga profesional	50,59		
- Sumbangan pendapatan perempuan	24,59		
IKG (Indeks Ketimpangan Gender).			0,54
- Faktor risiko kematian ibu			
- Fertilitas remaja			
- Pendidikan			
- Parlemen			
- Pasar kerja			

Data di atas memperlihatkan masih tingginya kesenjangan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara juga memuat isu ketimpangan gender dalam berbagai bidang, baik tersurat maupun tersirat. Masih ditemukannya kesenjangan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan Gender.

Pada Tahun 2022, isu strategis gender Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh/kelembagaan PUG yang belum optimal. Kelembagaan PUG sebagaimana tertuang dalam Perda PUG, terdiri dari kelompok kerja (Pokja) PUG yang terdiri dari pimpinan perangkat daerah (PD), *focal point* gender yang tersebar di seluruh PD, tim teknis PUG dan forum peduli gender. Pokja PUG yang merupakan ruang koordinasi dan advokasi PUG belum berjalan optimal, begitupun *focal point* gender masih belum cukup kuat dalam melakukan advokasi dalam memastikan kebijakan/program/kegiatan PD yang responsif gender.

2. Kualitas SDM yang tidak merata dalam berbagai bidang

a. Pendidikan

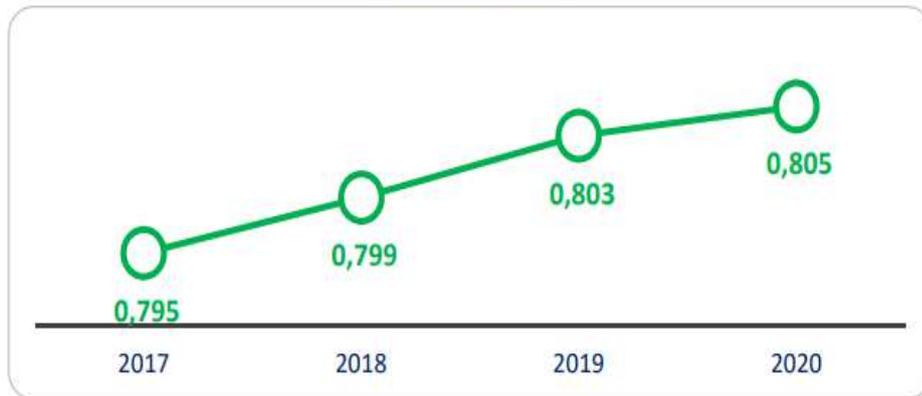
Indeks pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara memperlihatkan tren positif dimana pada Tahun 2020, indeks pendidikan mencapai 0,685%. Namun masih ada beberapa tantangan pada aspek pelayanan pendidikan, seperti masih belum meratanya sarana dan prasarana fisik pendidikan serta masih belum meratanya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri maupun swasta di setiap sekolah. Isu ini merupakan fokus kebijakan yang akan diselesaikan dalam 5 tahun mendatang melalui koordinasi dan inovasi dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata. Khususnya aspek teknologi informasi.

b. Kesehatan

Kematian ibu masih menjadi persoalan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun angkanya menurun dari 38 kasus di Tahun 2021 menjadi 24 kasus di Tahun 2022. Penyebab langsung kematian ibu sebanyak 11 kasus (45,84%) dan penyebab kematian tidak langsung sebanyak 9 kasus (37,5%), disebabkan oleh perdarahan antepartum, intrapartum dan postpartum. Kematian bayi mengalami penurunan. Tahun 2021 sebanyak 169 bayi, sementara di Tahun 2022 sebanyak 121 kematian. Kasus terbanyak yaitu BBLR (35%) dan asfiksia (21%).

Indeks kesehatan menunjukkan tren yang positif. Meskipun begitu, beberapa permasalahan dalam bidang kesehatan harus diatasi untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas. Cukup tingginya kasus kematian ibu dan bayi menjadi salah indikator masih kompleksnya permasalahan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Indeks Kesehatan



Beberapa permasalahan dalam bidang kesehatan meliputi belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama pada masyarakat terpencil, rendahnya kualitas fasilitas kesehatan di wilayah terpencil/pelosok, kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, cakupan layanan asuransi/jaminan kesehatan bagi masyarakat yang belum optimal, distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata, masih terbatasnya keterlibatan para pihak dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, serta kurang sehatnya lingkungan dan pola hidup masyarakat yang meningkatkan kerentanan terhadap keterpaparan penyakit.

3. Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat yang bisa dilihat dari tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan pengangguran. Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 sebesar 7,96%, rasio gini 0,269%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,14 % dengan perbandingan TPT laki- laki sebesar 1,86% dan perempuan sebesar 2,29%. Sementara angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 61,95% dengan komposisi TPAK laki -laki 82,83% dan TPAK perempuan sebesar 39,04%.

Data di atas memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi di bidang ekonomi dibandingkan dengan laki-laki. Rendahnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjadi persoalan serius. Sebagian besar tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Kutai

Kartanegara hanya sampai SD, bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini berkontribusi pada minimnya pendapatan masyarakat karena daya tawar kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu komposisi dalam pemberian upah. Kompetensi yang rendah juga mengakibatkan kesulitan dalam persaingan pasar kerja berkualitas terlebih pada perempuan, terutama perempuan dari kelompok miskin.

4. Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik

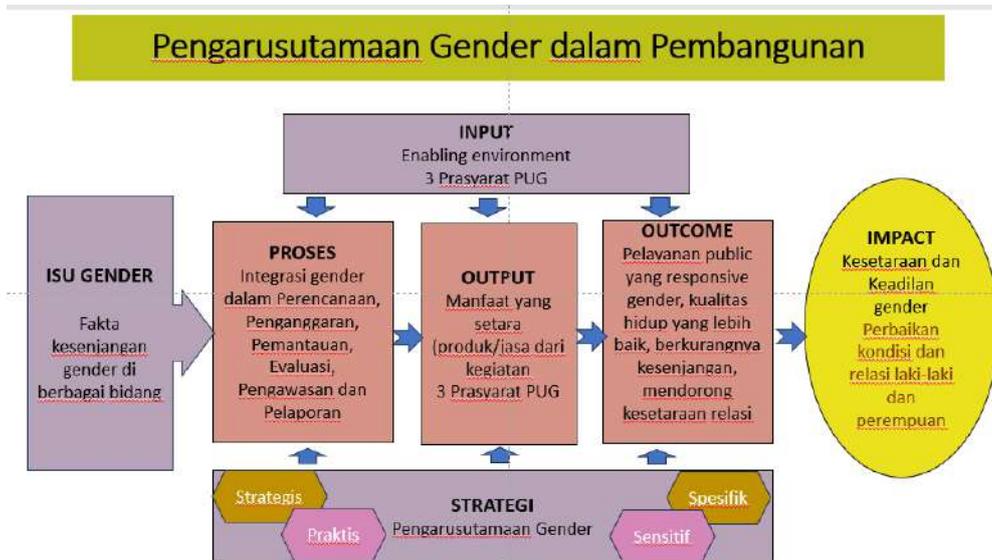
Data IDG dan IPG, sebagaimana tergambar dalam tabel sebelumnya, memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan di berbagai aspek dalam pengambilan kebijakan publik masih relatif rendah. Rendahnya capaian indikator terkait pemberdayaan gender ini menjadi asumsi awal bahwa pembangunan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara belum membuahkan hasil pada aspek pengambilan keputusan atau kepemimpinan perempuan di sektor publik. Inovasi-inovasi untuk merumuskan program dan kegiatan yang pro kesetaraan gender harus terus menerus dilakukan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam sektor publik.

5. Kekerasan pada perempuan dan anak

Kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 82 kasus terlapor. 78% kasus kekerasan terlapor terjadi pada perempuan, sementara 71% kasus kekerasan terlapor terjadi pada anak. Kekerasan pada anak laki-laki sebanyak 18 kasus, sementara pada anak perempuan sebanyak 40 kasus. Kekerasan seksual sebanyak 34 kasus merupakan jenis kekerasan terbanyak yang ditangani oleh UPT PPA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Long Form SP2020 memperlihatkan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun sebanyak 24,8 per 1000 perempuan. Kelahiran pada remaja ini sejalan dengan meningkatnya tren kekerasan berbasis *online*, sehingga perlu menjadi perhatian terkait dengan mudahnya mengakses konten pornografi maupun kekerasan serta tingkat kerentanan menjadi korban berbagai jenis kekerasan gender berbasis *online* (KGBO) yang meningkat seiring dengan meningkatnya akses internet.

B. Strategi dan Arah kebijakan



Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi mengintegrasikan gender dalam setiap proses pembangunan untuk menyelesaikan isu gender yang ada. Prasyarat PUG yaitu regulasi/kebijakan, SDM dan kelembagaan PUG, serta data terpilah merupakan input dalam pelaksanaan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan. Strategi PUG diterapkan dalam setiap proses pembangunan dan tercermin dalam *output*, *outcome* dan dampak. Strategi PUG diterapkan dengan pendekatan ganda (*twin track approach*) melalui kebijakan yang strategis dan praktis dan diterapkan melalui pendekatan sensitif gender dalam program dan kegiatan yang umum maupun program dan kegiatan yang spesifik menysasar kepada kelompok afirmasi gender seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas.

1. Strategi

Secara umum strategi penyelenggaraan PUG di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Penguatan Pelembagaan PUG terkait Tiga Prasyarat PUG

- 1) Kebijakan/regulasi. Strategi ini mencakup ketersediaan regulasi yang terkait dengan kebijakan teknis pelaksanaan strategi PUG dalam berbagai bidang dan dalam proses pembangunan. Regulasi dapat berbentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan, Surat Keputusan, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan OPD Kebijakan bisa juga berbentuk

pedoman atau panduan yang relevan. Ketersediaan regulasi mencerminkan adanya komitmen baik dari pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait pelaksanaan strategi PUG.

- 2) Sumber Daya manusia dan Pokja PUG. Penguatan SDM dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas terkait PUG dan PPRG kepada *focal point*, perencana dan pelaksana program di semua OPD melalui sosialisasi, penerbitan media KIE maupun pelatihan. Sosialisasi tentang PUG juga diberikan kepada anggota forum peduli gender dan masyarakat secara umum. Penguatan Pokja dilakukan melalui koordinasi berkala untuk memastikan Pokja PUG, *focal point* gender, tim teknis dan forum peduli gender menjalankan peran dan fungsinya, sehingga pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara terkoordinir, terarah dan terukur.
- 3) Data terpilah. Ketersediaan data terpilah yang terbaru (*updated*) menjadi prasyarat bagi kebijakan/program yang responsif gender. Data terpilah membuat program/kegiatan yang dirancang lebih berdaya guna dan tepat sasaran sehingga lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan.

b. PUG dalam Proses Pembangunan

Strategi dalam proses pembangunan dilakukan dengan memastikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan baik bagi perempuan dan laki-laki dalam setiap proses pembangunan.

- 1) Perencanaan, memastikan proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui analisis gender. *Driver* PUG/PPRG bersama tim teknis memastikan dokumen perencanaan 5 tahunan seperti RPJMD dan Renstra PD maupun perencanaan tahunan seperti RKPD dan Renja PD memuat isu gender dalam isu strategis; memastikan adanya program/kegiatan/sub kegiatan yang menjawab isu gender; memastikan adanya program/kegiatan/sub kegiatan yang menysasar kepada perempuan dan

kelompok afirmasi gender seperti penyandang disabilitas, anak, lansia, kelompok minoritas/terpencil. Dalam penyusunan rencana awal RPJMD/Renstra dan RKPD/Renja PD dan rancangan kegiatan /RKA, Driver PUG bersama tim teknis memberikan asistensi dan pendampingan dalam penyusunan analisis gender menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)*, penyusunan *Gender Budget Statement* dan KAK yang responsif gender.

- 2) Penganggaran, memastikan ketersediaan anggaran untuk program/kegiatan untuk mengurangi kesenjangan gender. Anggaran program/kegiatan yang responsif gender ini dibuktikan dengan adanya dokumen *Gender Budget Statement (GBS)*.
- 3) Pelaksanaan, memastikan pelaksanaan program/kegiatan mempertimbangkan partisipasi perempuan/laki-laki dan interseksinya dengan penanda sosial lain. Pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender ini ditandai dengan adanya dokumen KAK atau dokumen kerangka acuan kerja yang responsif gender.
- 4) Pemantauan, dilakukan dengan membandingkan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA-GBS-KAK) selama pelaksanaan program/kegiatan. Pemantauan dilakukan dengan mengacu kepada peraturan dan/atau panduan pemantauan program/kegiatan yang responsif gender.
- 5) Evaluasi, dilakukan pada setiap akhir tahun dengan membandingkan dokumen perencanaan (RKA) dengan dokumen pelaksanaan (DPA) dengan mengacu pada peraturan atau panduan terkait evaluasi.
- 6) Pengawasan, dilakukan mengikuti skema dan panduan pengawasan pembangunan dengan memastikan perspektif gender tertuang dalam panduan pengawasan.
- 7) Pelaporan, penyelenggaraan RAD PUG mengacu kepada mekanisme pelaporan pembangunan dan/atau pedoman pelaporan penyelenggaraan PUG.

- c. Peningkatan peran serta berbagai pihak melalui aksi kolaboratif multi sektor

Kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi semua pihak, baik keterlibatan dalam proses pembangunan maupun pendanaan. Partisipasi para pihak bisa dilakukan melalui Forum Peduli Gender maupun secara lembaga atau individu sesuai dengan peran dan fungsi di masyarakat. Para pihak yang tergabung dalam Forum Peduli Gender tersebut, sebagaimana tercantum dalam Perda PUG, antara lain:

1. Perguruan Tinggi
2. Media
3. Dunia Usaha
4. Organisasi Kemasyarakatan
5. Masyarakat umum

2. Arah Kebijakan

RAD PUG bukanlah dokumen yang terpisah dari dokumen perencanaan lain, namun merupakan dokumen yang melengkapi dokumen RPJMD, juga mempertimbangkan capaian target SDGs. Berikut adalah analisis keterkaitan isu strategis daerah dalam RPJMD dengan isu strategis gender dan program kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan gender. Matrik berikut memperlihatkan keterkaitan isu strategis daerah, isu strategis gender, arah kebijakan dan bagaimana rekomendasi strategi integrasi gender diterapkan dalam rencana aksi PUG.

Isu strategis daerah	Isu strategis gender daerah	Arah Kebijakan	Rekomendasi Strategi Rencana Aksi PUG
Pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh	Kelembagaan PUG belum optimal	(1) Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	Penguatan pokja PUG melalui <ul style="list-style-type: none"> - Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi Perangkat Daerah
		(2) Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Penguatan kebijakan dan regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Gender dalam dokumen perencanaan 5 tahunan dan tahunan daerah - Gender dalam dokumen perencanaan 5 tahun dan
		(3) Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis	

		IT	<p>tahunan PD</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE/pedoman Perencanaan dan - Penganggaran Responsif Gender - SE/pedoman pemantauan dan evaluasi - SE/pedoman pengawasan - Pelaporan penyelenggaraan PUG di daerah - Rencana kerja Pokja PUG baik lima tahunan maupun tahunan - mendorong regulasi dan kebijakan desa yang responsif gender <p>Penguatan Data terpilah gender dan sektoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data terpilah yang terbaru secara berkala <p>PUG dalam Proses pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pendampingan, asistensi dan bantuan teknis terkait PUG-PPRG
Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia	Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM perencana, program, pelaksana teknis, hukum, pengawasan dalam pelaksanaan PUG	(1) Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	<p>Penguatan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas SDM (perencana, penganggaran, teknis, inspektorat, bid hukum) tentang PUG-PPRG - Penguatan kapasitas <i>focal point</i> PUG <p>PUG dalam Proses Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan partisipasi perempuan dan kelompok afirmasi lainnya dalam musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten - Penguatan LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam menjalankan peran fungsi dalam aspek layanan (Informasi, konseling, pelatihan, jejaring rujukan dan

			<p>program (Sosialisasi/promosi, peningkatan kapasitas, pemberdayaan).</p> <p>Penguatan partisipasi masyarakat sesuai dengan keahlian dan peran di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perguruan tinggi - Dunia usaha - Organisasi kemasyarakatan - Media - Masyarakat umum seperti tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama
	<p>Rendahnya tingkat pendidikan baik perempuan maupun laki-laki</p>	<p>(1) Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu,</p> <p>(2) Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan</p>	<p>PUG dalam Proses pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pendidikan mempertimbangkan aksesibilitas bagi anak perempuan, anak di daerah terpencil, siswa miskin dan penyandang disabilitas - Mengembangkan model insentif pendidikan untuk wilayah terpencil
<p>Peningkatan kualitas SDM Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terutama SDM pendidikan di daerah terpencil 			
<p>Penguatan kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reviu dan Pengembangan Kurikulum/ bahan ajar 			
<p>Penguatan partisipasi masyarakat sesuai dengan keahlian dan peran di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perguruan tinggi - Dunia usaha - Organisasi kemasyarakatan - Media - Masyarakat umum seperti tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama 			
		<p>(1) Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu</p> <p>(2) Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif</p>	<p>PUG dalam Proses pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas, termasuk layanan kesehatan yang spesifik pada lansia, anak, perempuan dan penyandang disabilitas - Peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil

			<p>Peningkatan kualitas SDM Kesehatan terutama SDM Pendidikan di daerah terpencil</p> <p>Penguatan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai/ komprehensif di tingkat desa/ kecamatan secara bertahap
Terbatasnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik	<ol style="list-style-type: none"> (1) Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak (2) Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah (3) Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat (4) Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah (5) Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi perempuan dan kaum muda 	<p>Penguatan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan perempuan di bidang politik 	<p>Penguatan partisipasi masyarakat sesuai dengan keahlian dan peran di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kepemimpinan perempuan di partai politik dan lembaga kemasyarakatan di berbagai level mulai dari tingkat desa, kecamatan dan daerah
		<p>Kekerasan pada perempuan dan anak,</p>	<p>Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Lembaga Penyedia Layanan - Peningkatan Kualitas Keluarga (LPLPKK) - Optimalisasi FPKK di tingkat desa, kecamatan dan daerah - Mendorong Kajian yang implementatif dari Perguruan tinggi - kebijakan kesetaraan gender di Dunia usaha - Media yang ramah perempuan anak dan penyandang disabilitas
Pengembangan perekonomian berkelanjutan	Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat	(1) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Penguatan kebijakan <ul style="list-style-type: none"> - Reviu dan Pengembangan kebijakan perekonomian yang meningkatkan akses dan partisipasi perempuan, orang muda dan penyandang disabilitas
		(2) Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan	Peningkatan SDM <ul style="list-style-type: none"> - pelatihan keterampilan bagi perempuan, orang muda dan penyandang disabilitas
		(3) Peningkatan produktivitas industri kreatif	Penguatan partisipasi masyarakat sesuai dengan keahlian dan peran di masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Perguruan tinggi - Dunia usaha - Organisasi kemasyarakatan - Media - Masyarakat umum seperti tokoh
Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah	Infrastruktur dasar yang belum merata dan ramah perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak dan masyarakat miskin	(4) Peningkatan kemudahan perizinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi	
		(5) Pemulihan daya dukung lingkungan	
		(6) Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	
		(7) Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah	
Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah	Infrastruktur dasar yang belum merata dan ramah perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak dan masyarakat miskin	(1) Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Pengembangan sarana prasarana yang responsif gender, seperti <ul style="list-style-type: none"> - Trotoar ramah disabilitas - Bangunan publik ramah disabilitas - Taman ruang terbuka hijau yang ramah anak dan aman
		(2) Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN	Pemenuhan air bersih bagi seluruh masyarakat termasuk

		(3) Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	<p>masyarakat miskin perkotaan, air bersih di kawasan terpencil dan terisolir</p> <p>Ketersediaan infrastruktur dasar energi yang aksesibel bagi masyarakat miskin perkotaan dan wilayah terpencil</p> <p>Penguatan partisipasi masyarakat sesuai dengan keahlian dan peran di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perguruan tinggi - Dunia usaha - Organisasi kemasyarakatan - Media - Masyarakat umum seperti tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama
Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan	<p>(1) Terbatasnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik</p> <p>(2) Rendahnya kapasitas SDM</p>	<p>(1) Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>(2) Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah</p>	<p>Mengembangkan Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang memiliki program/kegiatan yang responsif gender</p> <p>Penguatan partisipasi masyarakat sesuai dengan keahlian dan peran di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perguruan tinggi - Dunia usaha - Organisasi kemasyarakatan - Media - Masyarakat umum seperti tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama

BAB III
PEMANTAUAN EVALUASI-PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PUG

A. Aspek penting dalam pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Penyelenggraan PUG tergambar dalam tabel berikut:

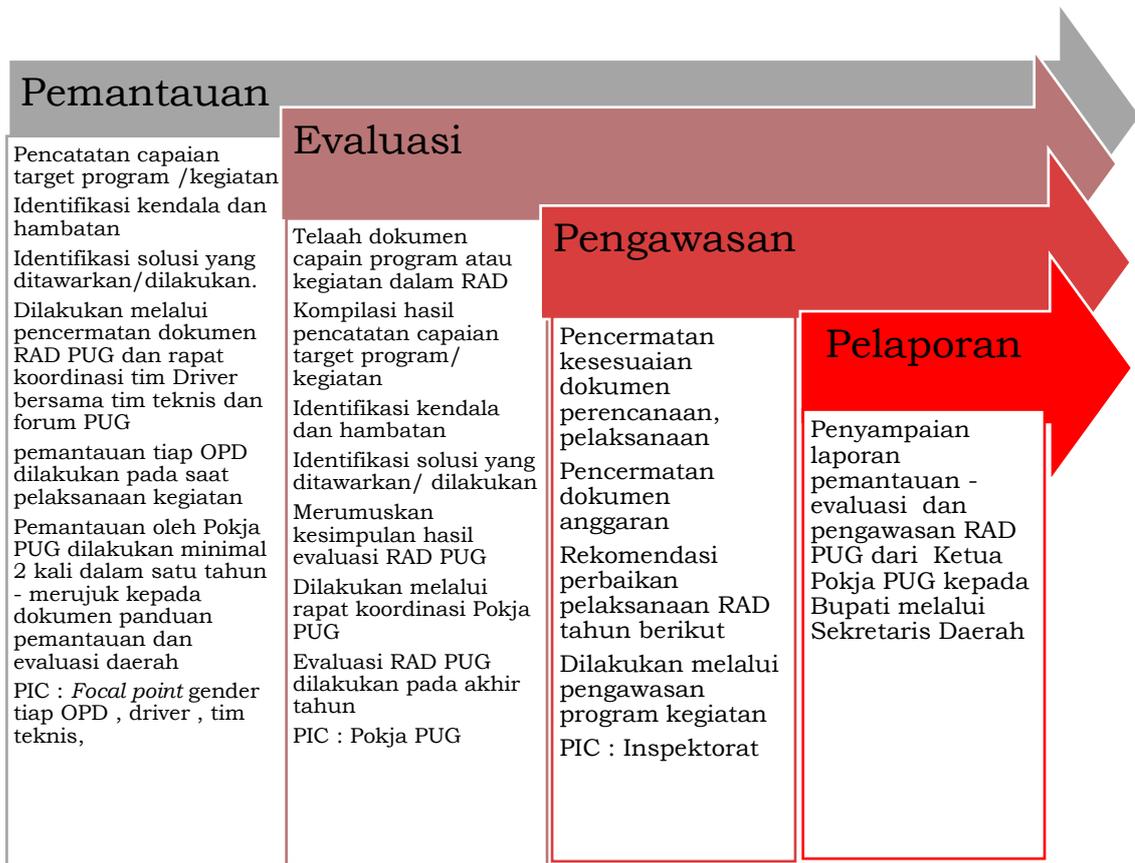
Aspek	Deskripsi
Rencana aksi yang sudah terlaksana	Tuliskan rencana aksi yang sudah dilaksanakan. Bisa dideskripsikan bagaimana pelaksanaan dari rencana aksi tersebut
Anggaran yang terealisasi	Berapakah anggaran yang terserap
Keluaran/capaian langsung dari rencana aksi yang terlaksana	Apa saja keluaran langsung dari rencana aksi/kegiatan yang sudah terlaksana. Sajikan dalam data terpilah, (termasuk target sasaran yang bisa dicapai)
Keluaran/capaian langsung dari rencana aksi yang tidak terlaksana	Apa saja keluaran langsung dari rencana aksi/kegiatan yang tidak terlaksana. Sajikan dalam deskripsi singkat
Kendala / tantangan pelaksanaan rencana aksi	Tuliskan apa saja tantangan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi. Apakah ada tantangan yang berbeda yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan juga interseksi/keterkaitannya dengan kedisabilitas, kesejahteraan, geografi dll
Penyesuaian/ solusi yang dibutuhkan	Tuliskan apa saja penyesuaian/ perubahan yang dibutuhkan agar rencana aksi bisa dijalankan. Tuliskan juga intervensi khusus yang diperlukan kelompok tertentu agar tujuan dapat tercapai

B. Format C adalah sebagai contoh berikut:

Contoh format pengisian pemantauan Penguatan SDM

Program	Indikator	Satuan	Target	Capaian	Instansi penanggung jawab	Identifikasi Tantangan /hambatan	Rekomendasi/ solusi yang dibutuhkan
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	3000	L:.... P:.....	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

C. Mekanisme pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Penyelenggraan PUG



BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Matriks RAD PUG Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2026

Isu Strategis Gender	Rekomendasi Rencana Aksi PUG	Program	Indikator	Satuan	Kondisi awal	2024			2025		2026		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Target	Target	Anggaran (Juta Rupiah)	Target	Anggaran (Juta Rupiah)	Target	Anggaran (Juta Rupiah)	
Kelembagaan PUG yang belum optimal	(1) Penguatan Pokja PUG (2) Kebijakan umum dalam berbagai bidang yang berperspektif gender	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset yang dimanfaatkan di lingkungan Setda	Persen	78	78	79	195,8	79	195,8	80	195,8	Sekretariat Daerah
			Persentase nilai SAKIP PD nilai BB dan A	Persen	60	70	80		90		100		
			Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	87	92	96		98		100		
			Nilasi SAKIP PD	Angka / Nilai	77	78	79		80		81		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan tatapemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	34289,6	100	34289,6	100	34289,6	
			Persentase rumusan kebijakan kesra yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100		100		100		
			Persentase regulasi daerah (Perda dan Perbub)	Persen	100	100	100		100		100		
			Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	85		90		90		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	3646,85	100	3646,85	100	3646,85		
		Persentase permasalahan kebijakan adminitrasi kebijakan pembangunan daerah yang diselesaikan	Persen	100	85	90							

			Persentase kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100		100		100		
			Persentase pengadaan barang jasa yang diselesaikan	Persen	100	100	100		100		100		
	(1) PUG dalam dokumen perencanaan-penganggaran-monev-pengawasan dan pelaporan. (2) tersedia regulasi/panduan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanunan yang responsif gender (3) Gender menjadi materi dalam asistensi penyusunan ranwal RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, RKA/DPA dan dalam dokumen perencanaan	ROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	persen	n/a	100	100	4.212	100	4.212	100	4.212	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(1) Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD (2) Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD (3) Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	persen	100	100	100	3.109,25	100	3.109,25	100	3.109,25	

	Gender menjadi perspektif dalam setiap penelitian dan pengembangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	(1) Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, (2) Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan (3) Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan (4) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Persen	100	100	100	1.490	100	1.490	100	1.490	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	(1) PUG menjadi muatan dalam materi diklat (2) pengembangan kompetensi mempertimbangkan rasio keterwakilan perempuan dan mendorong kepemimpinan perempuan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	92	93	94	3.565	95	3.315	96	3.215	Badan Kepeawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen	18,38	20,65	22,64	2.130	24,64	2.030	26,64	2.130	

	(1) Kebijakan ARG melalui SE dan panduan Perencanaan Anggaran responsif gender dan Monev PPRG (2) asistensi dan pendampingan penyusunan ARG (3) pengawasan program/kegiatan responsif gender PD (4) Peningkatan kapasitas mempertimbangkan kesetaraan gender	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(1) Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu (2) Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai prinsip penganggaran yang baik (3) Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran (4) persentase aparatur perencanaan anggaran PD mendapat pembinaan perencanaan anggaran (5) Persentase laporan keuangan disajikan tepat waktu (6) Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi (7) Persentase pejabat penatausahaan keuangan (PPK) PD yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP (8) Tingkat pemenuhan pedoman/peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah (9) Persentase transaksi non tunai (10) Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu (11) Persentase pengelola keuangan PD mendapat pembinaan penatausahaan keuangan (12) Penyediaan belanja tak terduga dan jumlah lokasi desa yang mendapat bantuan keuangan daerah	persen	100	100	100	484.135.000	100	484.135.000	100	484.135.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
--	--	-------------------------------------	--	--------	-----	-----	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--

		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	(1) Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai permendagri 19/2016 (2) persentase PD melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan (3) Persentase PD yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD (4) Persentase pengelola BMD PD mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Persen	100	100	100	2129,54	100	2129,54	100	2129,54	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat kerja DPRD	Persen	77	79	81	74587,06	83	74587,06	85	74587,06	Sekretariat DPRD
			Persentase Fasilitasi pengawasan dan pembahasan penganggaran APBD	Persen	100	100	100	30840,81	100	30840,81	100	30840,81	
(1) SE kepala Inspektorat terkait gender sebagai materi pengawasan untuk program/kegiatan responsif gender (2) Mengembangkan Panduan/pedoman SPIP berperspektif gender		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	96	96	96	10.200	97	10.200	97	10.200	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	55	65	75	3.500	85	3.500	100	3.500	
Informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah / OPD mempertimbangkan aspek gender dan perlindungan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan diseminasi informasi dan komunikasi publik	Persen	100	100	100	2605,36	100	2605,36	100	2605,36	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	100	12033,33	100	12033,33	100	12033,33	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	1450	100	1450	100	1450	
(1) Aksesibilitas layanan kependudukan bagi penduduk miskin, penyandang disabilitas dan penduduk di wilayah terpencil (2) Ketersediaan Data Terpisah Gender dan sektoral yang terbaru secara berkala (3) informasi yang mudah dipahami dan aksesibel bagi beragam disabilitas (4) Aplikasi kependudukan yang aksesibel		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99%	99%	99%	1.000,00	99%	1.225,00	99%	1.475,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Kepemilikan KIA	Persen	50	70	90		99		99		
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	97%	98%	99%	1.210,89	99%	1.410,89	99%	1.510,89	

			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	85	90	95		99		99		
			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	99	99		99		99		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100%	100%	100%	475,00	100%	475,00	100%	475,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	Persen	100%	100%	100%	160,00	100%	160,00	100%	160,00	
		(1) akses layanan perijinan yang aksesibel (2) pendampingan kepada pengaju ijin usaha (3) penerbitan ijin usaha dilakukan dengan mempertimbangkan risiko	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	Izin	750	850	950	1.100	1050	1.100	1150	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	15	15	15	700	15	700	15	700		
Kualitas SDM yang tidak merata, baik jumlah maupun kompetensi SDM (tingkat pendidikan & TPAK perempuan < Laki-laki, TPT perempuan > Laki-laki) perencana, program, pelaksanaan teknis, hukum dan pengawasan dalam pelaksanaan PUG	(1) Peningkatan layanan pendidikan bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan (2) Peningkatan sarana prasarana yang aksesibel, ramah dan aman bagi anak dan penyandang disabilitas, (3) Insentif bagi siswa miskin, dan siswa rentan putus sekolah(4) peningkatan kualitas SDM pendidikan terutama di perdesaan dan wilayah terpencil, (5) Insentif bagi sekolah/SDM di wilayah terpencil/ jauh dari pusat pemerintahan, (6) mengembangkan kurikulum dan metodologi pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan usia dan aksesibel bagi anak penyandang disabilitas, (7) review kurikulum, memastikan perspektif gender dalam bahan ajar (8) Pengembangan budaya dan kearifan lokal yang mendukung kesetaraan gender	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Persentase	85,86	87	88,43	331232,04	89,71	325.307,43	90,71	360.098,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persentase	84,86	86	87,43		88,71		89,71		
			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Paud (Angka Indeks Max 7)	Persentase	78,72	80,6	82,02		83,02		83,92		
			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 7)	Persentase	64,08	65,98	67,38		68,38		69,28		
			Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	3000	3000	3000		3000		3000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok)	Persentase	10%	50%		100%		650		

		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase terpenuhi jumlah guru	Persen	87%	90%	92%		95%		97%		
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan yang Mmiliki Izin Pendidikan dan Operasional	Persen	100%	100%	100%	250	100%	250	100%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Caupan Sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata Pelajaran	Persen		50%	70%		90%		100%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	10	20	20	440	30	450	30	4.500.000.000	
			Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	Persentase	100	100	100		100		100		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Lembaga Seni Budaya Yang Aktif	Persentase	60%	65%	70%	1.950	75%	2.000	80%	2.050	
	(1) perpustakaan yang aksesibel bagi perempuan, anak penyandang diasbilitas (2) koleksi perpustakaan yang mendorong kesetaraan baik media cetak dan elektronik, audio visual (3) perpustakaan desa terutama untuk desa terpencil	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	26,4	32,8	37,38	2.130	42,34	2.130	46,98	2.130	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	(1) peningkatan layanan kesehatan dengan pembangunan sarana prasara kesehatan yang memadai dan meningtkkan jumlah dan kapasitas SDM kesehatan terutama di daerah perdesaan dan terpencil (2) meningkatkan akses layanan kesehatan bagi penduduk miskin, perempuan, lansia baik laki-laki dan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas (3) Peningkatan kompetensi SDM dengan memastikan muatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Balita Stunting	Persen	15,6	15,1	14,6	130.422,25	14,1	130.422,25	13,8	130.422,25	Dinas Kesehatan
Cakupan Keluarga Sehat			Persen	0,25	0,3	0,35	0,4		0,5				
Indeks pelayanan kesehatan reproduksi I			Persen	0,73	0,74	0,75	0,76		0,77				
Indeks pelaynan kesehatan balita			Persen	0,57	0,59	0,61	0,63		0,65				
Indeks pelayanan penyakit menular			Persen	0,57	0,59	0,61	0,63		0,65				

<p>gender dalam kurikulum, (4) Meningkatkan partisipasi laki-laki dalam KB, (5) Mengembangkan/menguatkan sistem informasi kesehatan terintegrasi yang mudah diakses (6) Optimalisasi peran posyandu, kader sehat, kader KB, dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan di masyarakat (7) insentif bagi champions bidang kesehatan (8) sistem rujukan yang terintegrasi dan aksesibel (5) peningkatan Kompetensi SDM kesehatan</p>		Indeks pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0,46	0,48	0,5		0,53		0,54		
		Indeks pelayanan kesehatan lingkungan	Persen	0,86	0,87	0,88		0,89		0,9		
		Indeks pelayanan kesehatan primer	Persen	0,36	0,38	0,4		0,43		0,45		
		Indeks perilaku Kesehatan	Persen	0,45	0,46	0,47		0,48		0,49		
		Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna dan Prima	Persen	21,88	25	28,13		31,25		34,28		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	68	70	75	1.750	80	1.750	85	1.750	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	terselenggaranya pelayanan perijinan, pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persen	100	100	100	353,50	100	353,50	100	353,50	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian RT-BHBS	Persen	30%	32%	34%	662	36%	662	40%	662	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS	Persen	88,5%	89%	89,5%	5000	90%	5000	90%	5000	RS Aji Muhammad Parikesit81
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	81	81,5	89,50	5.000	82	2,191	82,5	1,016	RSUD Aji Bathara Agung Dewa Sakti
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang terlatih sesuai kompetensi	Persen	50	55	60	864	65	801	-	-		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	83	85	87,5	13.670	90	16.240,26	93	16.240,26	RSUD Dayaku Raja	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya	Persen	-	-	20	150	40	100	60	100		

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	Persen	100	100	100	2500	100	2500	100	2500	
	Keterbukaan akses dan partisipasi masyarakat baik perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat dalam PSKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persentase	86	88	90	700	92	700	94	700	Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan & Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bentuk kegiatan dan dukungan rehabilitasi dilakukan melalui konsultasi dengan PMKS	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Persentase	100	100	100	50	100	50	100	50	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya diluar panti (Indikator SPM)	Persentase	100	100	100	1.990	100	1.990	100	1.990	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	80	85	90	9.394	95	9.394	100	9.394	
			Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen	100	100	100		100		100		
		(1) Data terpilah gender dan anak dan data pilah sektoral yang terbaru (2) Koordinasi Pokja PUG secara berkala (3) peningkatan kapasitas SDM mempertimbangkan proporsi dan ketugasan (4) Optimalisasi peran masyarakat dengan pelibatan keterwakilan lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, Perguruan tinggi dan lembaga profesi dalam PATBM, LPLPP, LPLPHP, LPLKK, LPA (5) pembinaan dan pengembangan kerjasama antar LPLPP (6) Mendorong perempuan sebagai gender champions dalam bidang politik dan pengambilan kebijakan publik (7) pendidikan politik bagi perempuan sejak remaja (8) mendorong peran serta partai politik terkait kepemimpinan	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	12,18	15,74	19,31	550?	22,92	550?	26,49	550?
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Persen	28,85	48,08	57,69	81	80,77	81	100,00	81			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100%	100%	100%	100	100%	100	100%	100	

perempuan (8) pengembangan KIE yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas (9) mengembangkan model peer learning /peer conselor & Optimalisasi forum anak sebagai upaya deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dan anak (10) Mendorong peran aktif laki-laki dan ber KB (11) optimalisasi Bina Keluarga Balita, PIK R, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100%	100%	100%	215,00	100%	215,00	100%	215,00		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Persen	730	750	770	215	790	215	810	215		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	11,11	27,78	50	100	77,78	100	100	100		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDK	(1) Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK (2) Tersedia dokumen grand design kependudukan	Persen	30	35	40	625	45	650	50	550	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	(1)Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	77,1	77,2	77,22	1.060	77,25	1.057	77,25	4799		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	(1) Cakupan anggota Bina Keluarga Blita (BKB) aktif ber KB (2) Cakupan anggota BKR aktif ber KB (3) Cakupan anggota BKL ber KB (4)Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera tiap Kecamatan (5) Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Remaja dan konseling remaja / mahasiwa	Persen	65,31	67,25	69,78	1570	72,31	1390	72,48	1125		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT ADAT	Persentase Posyandu Aktif	Persen	45,22	51,51	57,79	1205	64,07	1205	70,35	1.205	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	100		100		100			
	(1) Pengembangan sistem data desa terpilah (2) Pengembangan tata ruang desa yang aman dan aksesibel bagi perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	50	70	80	4456,09	90	9456,09	95	4456,09	
			Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	10	10	10		10		10		
PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	1,55	5,18	10,36	370	25,91	370	38,86	370		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100	100	100	450	100	450	100	450		

	(1) Informasi kebencanaan yang aksesibel bagi perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan bagi warga di daerah terpencil dan rawan bencana (2) Peningkatan pengetahuan terkait kebencanaan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki dan perempuan, lansia dan penyandang disabilitas (2) Partisipasi perempuan, anak dan penyandang disabilitas dalam perencanaan kegiatan kebencanaan di daerah terutama daerah rawan bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana yang tertangani	Persen	100	100	100	625	100	625	100	625	Dinas Sosial		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	8,1	12,1	15,1	3.215	18,1	3.225	21,1	3.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Cakupan Pencegahan Bencana Daerah dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	10,6	13,6	16,6							19,6	22,6
			. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100							100	100
	(1) Sosialisasi kebencanaan/kebakaran baik di masyarakat maupun sekolah (2) Mendorong partisipasi masyarakat baik laki-laki dan perempuan dalam penanggulangan kebencanaan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	(1) persentase pemenuhan tingkat waktu tanggap (response rate time) daerah layann Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Persen	12,2	15,8	17,6	3.240	19,3	3.940	20,1	3.240	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			2) Jumlah pembentukan balakarcana (barisan Sukarela pemadam kebakaran	Kelompok	10	15	20							2520	30
			(3) Cakupan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100							100	100
	(1) Diseminasi informasi tentang peraturan daerah yang aksesibel dan mudah dipahami (2) Penguatan perananserta Masyarakat termasuk perempuan dalam deteksi dini risiko gangguan keamanan dan ketertiban Mendorong peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang lebih kuat dalam pendidikan politik bagi Perempuan dan anak muda	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(1) cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (2) Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketertaman, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	100	100	100	1.182,48	100	1.192,48	100	1.192,48	Satuan Polisi Pamong Praja		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparaturn dan Masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	1,59	1,78	1,99	900	2,17	700	2,34	650	Badan kesatuan bangsa dan Politik		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan layanan pendidkn politik daerah	Persen	11,36	11,62	14,27	3626,89	14,51	1802,89	14,75	1802,89			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	Persen	8,9	9,9	11,4	250	12,9	200	14,4	200			

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan Masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	Persen	1,09	1,21	1,33	610	1,45	630	1,58	630		
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik dan gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	2000	100	1900	100	1900		
Belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat - Rendahnya partisipasi perempuan dibidang pengambilan kebijakan publik & ekonomi (Sumbangan pendapatan & TPAK, yang rendah dan TPT perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki))	(1) Terbukanya informasi dan lapangan pekerjaan bagi perempuan dengan pendidikan terbatas (2) peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan dan orang muda untuk dapat mengakses pekerjaan yang memberikan kesejahteraan yang baik (3) Penguatan perlindungan pekerja perempuan, (4) kesetaraan upah pekerja perempuan dan laki di sektor pertanian/perkebunan/perhutanan/perikanan/pariwisata, (5) dukungan pemasaran dan sarana prasarana pemasaran online (6) Pengembangan peralatan/mesin produksi dan pengolahan yang ramah perempuan (7) Aksesibilitas modal dan insentif bagi pengembangan usaha mikro kecil (8) Diversifikasi sumber pangan/protein mempertimbangkan sumberdaya lokal (9) pengembangan olahan pangan segar mempertimbangkan pengetahuan lokal dan pengetahuan perempuan (10) partisipasi perempuan dalam kepengurusan kelompok / mendorong kepemimpinan perempuan (11) Konsultasi dengan stakeholder terkait perencanaan dan pengembangan program/kegiatan (12) mengembangkan layanan aduan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/Kap/hari	2050	2150	2175	1.650	2200	1.650	2225	1.650	Dinas Ketahanan Pangan	
			Kecukupan Konsumsi Protein	Gram/Perkap/hari	55,5	57	57,1		57,2		57,25			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan ketersediaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Unit	9	10	10	750	10	750	10	750		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan kerawanan pangan pada daerah yang terindikasi rawan pangan prioritas 1	Desa	5	5	5	500	5	500	5	500		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	90,77	91	91,5	300	92	300	93	300		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	71,95	74,39	76,83	5.500	79,27	5.500	81,71	5.500		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi dan peran serta masyarakat dalam olahraga	Persen	34,14	34,2	34,66	12.575	35,41	12.575	35,85	12.575		
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan kepramukaan	Persen	100	100	100	12.500	100	1.500	100	1.500		

		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan layanan Informasi tenaga kerja di wilayah kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	14,75	18,59	22,43	5.650	26,27	5.650	30,11	5.650	
			Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	1	2	3		3		3		
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	Persen	6,41	8,39	10,37	1779	12,35	1779	14,33	1779	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	Persen	100	100	100	500	100	500	100	500	
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang direncanakan	Kawasan	2	1	1	250	1	150	0	300	
			Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	1	1	1		1		1		
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	Kawasan	0	1	1	700	0	500	1	500	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan desa /Kimtrans yang dikembangkan	Kawasan	0	1	1		0	300	1	150	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan kelompok tani naik kelas	Persen	2	3	3	7.400	4	7.800	5	7.800	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi	80	85	85	400	95	400	100	400	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARAN PERTANIAN	(1) Panjang jalan usaha tani yang dibangun	Meyer	28267	33000	20000	26.661	2500	26.261	10500	26.261	

			Jumlah embung pertanian yang dibangun	Unit	100	100	100		100		100		
			panjang jaringan irigasi yang dibangun	Meter	2000	17000	10000		7500		69164		
			jumlah DAM parit yang dibangun	Unit	5	6	4		3		22		
			Jumlah pintu air yang dibangun	Unit	35	33	19		9		125		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase derajat kesehatan ternak	Persen	92	94	95	975	96	975	97	975	
			cakupan pengawasan hewan dan produk hewan	Jenis	5	5	5		5		5		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	80	85	90	3.050	95	3.050	100	3.050	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	2	3	3	7400	4	7800	5	7800	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN	Luas areal kelapa sawit rakyat	Ha	287570	28645	28720	3.376	28795	2.154	2880	2.288	Dinas Perkebunan
			Luas areal kelapa sawit PBS	Ha	214116	2377435	268526		307390		346255		
			luas area karet	Ha	17898	17928	17958		17988		18033		
			luas area lada	Ha	3402	3412	3427		3442		3452		
			Luas area kelapa dalam	Ha	7286	7291	7301		7306		7311		
			luas area kopi	Ha	78	89	110		119		125		
			luas area kakao	Ha	80	85	95		95		100		
			luas area aren	Ha	237	243	248		248		253		
			luas area kelor	Ha	5	7	9	9	9				

		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	panjang jalan produksi perkebunan yang dibangun	Meter	3600	3600	4000	2.738	4000	2.625	4800	2.680	Dinas Kelautan dan Perikanan
			jumlah embung yang dibangun	Unit	3	4	4		5		4		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan gangguan OPT perkebunan	Persen	86,7	72	56	450	38,7	450	20	450	
		PROGRAM PERIJINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah penerbitan STDB	surat STDB	200	200	200	300	200	250	200	250	
			Jumlah Perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Surat PUP	11	3	20		10		3		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	4,8	9,7	14,6	650	19,6	650	24,6	600	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	82.400	86.520	95.172	25.745	104.689	26.745	115.158	27.795	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	150,656	165,721	185,608	29.726	207,881	29.726	232,827	29.726	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan	5	20	20	5.500	20	4.500	20	3.450	
			Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	Persen	92	93	95		98		100		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	22,762	23.900	25.095	1.900	26.350	1.900	27,668	1.900			
	Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1.530	1,607	1,687		1,771		1,86				

		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	Persen	95,24	97,6	98,56	715	98,81	765	99,04	850	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	cakupan sarana prasarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	43	54	65	7.260	756680	86	21616		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	43,00	54,00	65,00	7.260	75,00	6.680	86,00	21.616	
			Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	3,33	3,35	3,62		4,22		4,22		
			Indeks Kualitas Pasar	Nilai	48,00	53,00	58,00		62,00		67,00		
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	Persen	3,72	3,67	3,62	1250	3,57	1355	3,52	1500	
			persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	Persen	97,86	98,04	98,21		98,89		98,57		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan ekspor produk unggulan	Persen	100	100	100	1250	100	1355	100	1550	
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	Perssem	26	27	28	450	30	485	31	550	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	Dokumen	2,00	2,00	2,00	20.045	1,00	20.110	1,00	4.300	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemberian izin usaha industri	Persen	100	100	100	250	100	290	100	400	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha	Persen	45,9	53,3	60,7	100	68,2	100	75,6	100	Dinas Koperasi dan UMK

		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase kepatuhan koperasi melaksanakan RAT	Persen	15,56	19,46	21,4	450	23,35	450	27,24	550	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP / USP berkategori sehat dan cukup sehat	Persen	3,7	7,4	11,1	210	14,8	215	18,5	220	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas yang memiliki sertifikasi pelatihan perkoperasian	Persen	100	100	100	300	100	300	100	300	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	(10 Persentase meningkatnya aset koperasi (2) Persentase meningkatnya volume usaha (omset) koperasi	Persen	0,97	1,95	2,92	585	3,89	690	4,86	800	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	1,81%	1,99%	1,99%	2.330	1,99%	2.405	1,99%	2.280	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Omzet	Persen	0,3%	0,6%	0,9%	2.190	1,1%	2.190	1,4%	2.190	
	(1) Pariwisata berbasis komunitas dengan memastikan partisipasi perempuan dan kelompok muda, dalam pengelolaan pariwisata. (2) mempertimbangkan pariwisata yang aman dari risiko meningkatnya pekerja anak, dan penyebaran Penyakit meluar seksual	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	59,14	64	82	5.080,00	100	5.080,00	100	5.080,00	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Okupansi	Persen	23,28	26,28	29,28	1.125,00	32,28	1.125,00	35,28	1.125,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7%	7%	7%	9.070,00	7%	9.070,00	7%	9.070,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	4,00	4,00	5,00	1.050,00	6,00	1.050,00	7,00	1.050,00	
	(1) keterbukaan akses informasi (2) sistem pengajuan dan penerbitan ijin yang transparan dan akuntabel	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN/PMA	Proyek	625	640	652	1.200.000.000	665	1.200.000.000	685	1.200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	1125	1130	1135	950.000.000	1140	950.000.000	1145	950.000.000	

		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan izin	Izin	750	850	950	1.100.000.000	1050	1.100.000.000	1150	1.100.000.000	
(1)konsultasi program kepada perempuan, masyarakat adat/ kelompok (2) Penguatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam program/kegiatan		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	60	100	400	100	400	67	400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase pemenuhan Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	Persen	20	20	20	2.200	20	2.200	20	2.200	
		PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Persen	16,67	16,67	16,67	300	33,33	300	16,67	300	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	(1)Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi (2) Penurunan Emisi GRK	Pohon	200.000	200.000	200.000	2.425	200.000	2.425	200.000	2.425	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	4	4	4	175	3	175	3	175	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19,32	19,32	19,32	600	19,32	600.	19,32	600	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG	(1) Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH di Kabupaten/Kota	Persen	66,67	75	75	75	75	75	66,67	75	
			Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Hukum Adat	Persen	70	70	70	95	70	100	70	100	

		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Mendapatkan Pendidikan/Pelatihan/Penyuluhan	Lembaga	35	35	35	575	35	575	35	575	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan yang diberikan	Jumlah penghargaan	124	126	128	100	129	150	119	100	
			Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/ Kelurahan	0	5	5		5		6		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diteritikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	Persen	95	96	97	200	98	200	100	200	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah tempat ppembuangan akhir (TPA) yang dibangun	Lokasi	2	2	1	12160	1	12160	1	12160	
			Timbulan sampah	Persen	88,18	94,84	97,6		99,52		99,96		
Infrastruktur dasar yang belum merata dan ramah terhadap perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin	(1) Pembangunan infrastruktur dasar yang aksesibel dan aman bagi perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas (2) mengembangkan mekanisme konsultasi kepada stakeholder terkait (3) mengembangkan mekanisme layanan pengaduan (4) Partisipasi tokoh masyarakat/adat, perempuan, Perguruan Tinggi dalam koordinasi dan penetapan RRTR	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	(1) Cakupan layanan perumahan layak huni bagi korban bencana (2) Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100	42,72	7.536,38	100	7.536,38	100	7.536,38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	31,77	37,25	18	1.114	14	1.114	53,67	1.114	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	(1) Persentase RTLH (jumlah pelaksanaan bedah rumah Kukar Idaman	Persen	7,2	7	6,7	10.340	6,4	10.340	6,1	10.340	

		ROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan rumah yang memiliki akses jalan perumahan dalam kondisi baik	Persen	4,69	4,48	4,3	1.350,00	4,29	1.350,00	4,11	1.350,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	89,32	90,74	92,16	14.469	93,58	41.267	95	11.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase penyediaan SPAM Perdesaan (50 unit)	Persen	83,4	85	86,7	6.000	88,3	6.000	90	6.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah sampah yang ditangani	Persen	73	72	71		70	11.820.000.000	70	11.820.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	9,09	10,91	12,73		14,55		16,36		
			Persentase cakupan area pelayanan	Persen	33,33	50	61,11		71,22		83,33		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	70	75	80	2.300	85	2.300	85	2.300	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0,76	0,78	0,80	29.650	0,82	29.650	0,85	29.650	Dinas pekerjaan Umum
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0,02	0,03	0,05		0,06		0,08		

			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio		0,01	0,02		0,03		0,04			
	(1) Infrastruktur jalan dan transportasi yang aman dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, anak, lansia dan perempuan (2) menbgembangkan mekanisme layanan pengaduan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	63,6	64,2	64,7	43.725	65	43.725	65,1	43.725		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		(1) Cakupan pengembangan jasa konstruksi (Sop, Data, Layanan, Infrastruktur dan tenaga terampil/ahli)	Persen	n/q	100	100	950	100	950	100	950			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen		32,41	34,41	4.600	36,41	4.600	38,41	4.600			Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Prosentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayaran	Persen		52	52	1.600	52	1.600	52	1.600			
KECAMATAN														
Isu Strategis Gender	Rekomendasi Rencana Aksi PUG	Program	Indikator	Satuan	Kondisi awal	2024			2025		2026		Perangkat Daerah penanggungjwa wab	
						Target	Target	Anggaran (Juta Rupiah)	Target	Anggaran (Juta Rupiah)	Target	Anggaran (Juta Rupiah)		
1)Kelembagaan PUG belum optimal 2)Keterbatasan kompetensi SDM, 3)Kesejahteraan yang	1) Pemberdayaan masyarakat desa menjangkau baik laki-laki, perempuan, anak dan penyandang disabilitas serta masyarakat di daerah terpencil 2) Mendorong peraturan desa dan Kebijakan , program, kegiatan yang berperspektif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	80	80	100	41286	100	41286	100	41286	Kecamatan Tenggarong	
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen-	100	100	100		100		100			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	34557,95	100	34557,95	100	34557,95		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa	Persen	100	100	100	80	100	80	100	80		

tidak merata, 4) Kekerasan terhadap perempuan dan anak, 5) Infrastruktur yang terbatas dan kurang aksibel	3) gender 4) Mendorong ketersediaan data terpilah Partisipasi kelompok Perempuan, penyandang disabilitas, forum anak, lansia, keterwakilan masyarakat adat) dalam musrenbang desa/kecamatan 5) Optimalisasi lembaga kemasyarakatan dalam perlindungan Perempuan dan anak	DESA	dalam kategori baik										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	70	70	75	27720	80	27720	80	27720	
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	100	100	100		100		100		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	330	100	330	100	330	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	200	100	200	100	200	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	90	100	100	256,84	100	256,84	100	256,84	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	80	80	80	14655	80	14655	80	14655	
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	100	100	100		100		100		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	61	62	63	15	64	15	65	15	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian, TNI dan instansi vertical serta tokoh agama dan tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	71	72	73	205	74	205	75	205	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	200	100	200	100	200	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	21	23	24	10	25	10	26	10	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	100	100	100	517,92	100	517,92	100	517,92	
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	65	65	65		65		65		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	456,56	100	456,56	100	456,56	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	100	100	100	5850	100	5850	100	5850	
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	80	80	80		80		80		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	77,5	78	78,5	480,65	79	480,65	80	480,65	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian, TNI dan instansi vertical serta tokoh agama dan tokoh	Persen	100	100	100	19,75	100	19,75	100	19,75	

			Masyarakat di wilayah kecamatan										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100			100	50	100	50	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	70	74	76	43,8	77	43,8	78	43,8	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	100	100	100	8390	100	8390	100	8390	Kecamatan Marangkayu
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	100	100	100		100		100		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	80	80	80	315	80	315	80	315	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	80	80	80	13273,52	80	13273,52	80	13273,52	
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	75	87,5	87,5		87,5		87,5		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	22076,91	100	22076,91	100	22076,91	Kecamatan Muara Jawa
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	83,3	100	100	450	100	450	100	450	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	75	75	75	17695	75	17695	75	17695	
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	100	100	100		100		100		Kecamatan Sambojo
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	72,7	72,7	72,7	38418,23	72,7	38418,23	72,7	38418,23	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	38	39	40	9615,56	40	9615,56	42	9615,56	
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	100	100	100		100		100		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	243	100	243	100	243	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian, TNI dan instansi vertical serta tokoh agama dan tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	1001		100	15	100		Kecamatan Sebulu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	200	100	200	100	200	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	40	50	60	65	70	65	80	65	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	80	80	6090	80	6090	80	6090	Kecamatan Muara Kaman
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	45	45	45		45		45		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	415	100	415	100	415	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	100	100	210	100	210	100	210	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	25	25	25	150	25	150	25	150	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	1650	100	1650	100	1650	Kecamatan Kota Bangun
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	88,1	88,1	88,1		88,1		88,1		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	67	67	67	288,83	67	288,83	67	288,83	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	55	60	60	211,13	60	211,13	60	211,13	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	71,4	72	72	50	73	50	73	50	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	500	100	500	100	500	Kecamatan Muara Muntai
				Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen-	88,5	88,5	88,5		88,5		88,5	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	85	90	95	75	100	75	100	75	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	90	95	95	285,52	97	285,52	100	285,52	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	2475	100	2475	100	2475	Kecamatan Kenohan	
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan		100	100	100		100		100			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	341	100	341	100	341		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	60	65	70	20	75	20	85	20		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	550	100	550	100	550		Kecamatan Kembang Janggut
			Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan		86,4	86,4	86,4		86,4		86,4			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	310	100	310	100	310		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	100	100	100	50	100	50	100	50		

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	75	77	80	20	80	20	82	20	Kecamatan Tabang	
		Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	89,5	89,5	89,5		89,5		89,5			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	1640,2	100	1640,2	100		1640,2
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	60	70	75	200	80	200	85		200
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian, TNI dan instansi vertical serta tokoh agama dan tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	100	10	100	10	100	10	Kecamatan Muara Wis	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	200	100	200	100		200
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa dalam kategori baik	Persen	45	57,1	71,4	385	71,4	385	85,7		385
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	-Persen	100	100	100	6015	100	6015	100	6015		Kecamatan Sanga Sanga

		Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen-	100	100	100		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	6310,86	100	6310,86	100	6310,86	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian, TNI dan instansi vertical serta tokoh agama dan tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	100	50	100	50	100	50	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	100	100	100	628,11	100	628,11	100	628,11	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dialkaskan sesuai SOP	Persen	70	70	80	15300	80	15300	80	15300	
		Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	81,3	81,3	81,3		81,3		81,3		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Persen	90	90	90	80	90	80	90	80	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Persen	100	100	100	200	100	200	100	200	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggara kinerja pemerintah desa dalam kategori baik	Persen	90	90	90	223,15	90	223,15	90	223,15	
												Kecamatan Anggana

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya RAD PUG ini maka setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan para pihak terkait dilaksanakan secara lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Namun demikian perlu disadari bahwa pelaksanaan PUG tidaklah lepas dari tantangan. Komitmen, efektifitas kelembagaan PUG, pemahaman dan kompetensi para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan dalam pengintegrasian gender, baik dalam perencanaan dan penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan menjadi kunci pencapaian target RAD PUG. Oleh sebab itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan menjadi mutlak dibutuhkan agar RAD PUG ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

RAD PUG menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dalam mengintegrasikan gender dalam setiap tahapan pembangunan. Kebijakan yang ditetapkan selalu didasarkan pada data terpilah gender dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan. Ditetapkannya RAD PUG berimplikasi pada ketersediaan anggaran untuk melaksanakan proses pembangunan yang responsif gender. Ketersediaan anggaran yang responsif gender tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara serta APBD. Kebijakan daerah yang responsif gender dilaksanakan melalui program/kegiatan di setiap PD. RAD PUG berimplikasi pada adanya anggaran untuk program dan kegiatan/sub kegiatan di setiap PD yang tertuang dalam RAD PUG. Program yang prioritas PD yang tertuang dalam RAD ini harus responsif gender dan dilakukan melalui analisis gender. Dengan demikian anggaran program/kegiatan/sub kegiatan tersebut juga menjadi responsif gender. Pada tahap awal program yang dilakukan analisis gender berfokus pada program prioritas, meski demikian, integrasi gender dapat dilakukan di semua program PD.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mendukung pelaksanaan RAD PUG ini dengan memperhatikan dan menerapkan strategi PUG dalam berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG.

RAD PUG Kabupaten Kutai Kartanegara ini memiliki jangka waktu tiga tahun sejak tahun 2024 hingga tahun 2026. RAD PUG ini bisa direview dan direvisi sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan kebijakan/program/kegiatan responsif gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG. Selain itu, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan ataupun perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan pelaksanaan PUG di Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap RAD PUG ini.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH